

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku:

- Achmad Subianto, Sistem Jaminan Sosial Nasional Pilar Penyangga Perekonomian Bangsa, Jakarta: Gibon Books, 2011.
- A. Hamid S. Attamimi, Teori Perundang-undangan Indonesia (Suatu sisi Ilmu Pengetahuan PerundangundanganIndonesia yang Menjelaskan dan Menjernihkan Pemahaman), Pidato Pengukuhan JabatanGuru Besar Tetap Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1992.
- Bagir Manan dan Kuntana Magnar, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, Bandung:Alumni, 1993.
- Bagir Manan, Pengujian Yustisial Peraturan Perundang-undangan dan Perbuatan Administrasi Negara di Indonesia, makalah Dalam Kuliah Umum Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 1994.
- Buku Saku BPJS, Paham Jaminan Kesehatan Nasional 2014
- Diana Halim Koentjoro, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, 2004.
- Eko prasetyo, kebijakan public tidak memihak rakyat, jogyakarata, Pusham UII, edisi 12 2009.
- Erman Radjagukguk, disunting dari Thomas M. Franck, *The New Development: Can American Law and Legal Institution Developing Countrie*, (Wisconsin Law Review No. 3, 1972).

- Faisal Basri dan Haris Munandar, *Perekonomian Indonesia, Tantangan dan Harapan bagi Kebangkitan Ekonomi Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2002.
- Hafiz Habibur Rahman, *Political Science and Government*, Eighth Enlarged edition (Dacca: Lutfor Rahman Jatia Mudran 109, Hrishikesh Das Road, 1971).
- H. Amidhan, *Hak Pekerja dan Jaminan Sosial dalam Instrumen Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta: Komnas HAM, 2005.
- Jimly Asshiddiqie, *konstitusi & konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Lutfi Effendi, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, Malang: Bayumedia Publishing, 2004. hlm. 86.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, (Surabaya, Bina Ilmu, 1987)
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Sentanoe Kertonegoro, *Reformasi jaminan sosial (studi perbandingan di berbagai Negara)*, Jakarta: Yayasan Tenaga Kerja Indonesia, 1997.
- Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.
- Sudarsono, *Kamus Hukum Edisi Baru*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, Cetakan kelima, 2007.
- Wiranto. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, 2010, hlm. 28-29.

Wirman Syafri, studi tentang administrasi public, Jakarta, 2012, hlm. 7-8.

## **B. Jurnal:**

Ahmad Nizar Shihab, Hadirnya Negara di Tengah Rakyatnya Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Jurnal legislasi Indonesia, volume 9, Juli 2012.

R.Herlambang Perdana Wiratraman, Jurnal Ilmu Hukum YURIDIKA Vol. 20, No. I Januari 2005

## **C. Peraturan Perundang-Undangan**

UUD 1945

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966 tentang Pemberian Pensiun Tunjangan Bersifat Pensiun dan Tunjangan Kepada Militer Sukarela

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1968 tentang Pemberian Pensiun Kepada Warakauri, Tunjangan Kepada Anak Yatim/Piatu dan Anak Yatim Piatu Militer Sukarela

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1991 tentang Asuransi Sosial Angkatan bersenjata

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1981 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum dan Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO)

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menjadi perusahaan perseroan

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan

Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2002 tentang pembentukan Tim Sistem Jaminan Sosial Nasional

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013

#### **D. Sumber Lain**

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Sosial, Departemen Sosial, Teks 9 Januari 2008, hlm. 34 dapat diunduh di URL :

<http://www.dniks.org/newsletter/NA-ruu-kesos-20080109.pdf>

Disampaikan pada acara Dialog Publik dan Konsultasi Nasional Komnas Perempuan “Perempuan dan Konstitusi di Era Otonomi Daerah: Tantangan dan Penyikapan Bersama”. Jakarta, 27 Nopember 2007.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 yang salah satu amar putusannya adalah menyatakan permohonan Pemohon III dan IV tidak dapat diterima karena para pemohon tersebut adalah warga Negara asing. Dengan demikian, Warga Negara asing tidak memiliki legal standing mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.

#### **E. Laman/Situs Internet**

Transformasi BPJS\_\_link\_footer\_\_Martabat - [www.jamsosindonesia.com](http://www.jamsosindonesia.com), 2013, diakses pada tanggal 25 April 2015

<https://tengkurizkilanera.wordpress.com/2014/09/12/masalah-terkait-bpjs-2014/>, diakses pada tanggal 27 April 2015

<http://www.pengertianpakar.com/2015/02/pengertian-tujuan-dan-fungsi-Negara.html#>, di akses pada tanggal 15 Mei 2015

<http://www.boyyendratamin.com/2012/01/tanggung-jawab-Negara-dalam-penegakan.html>, di akses pada tanggal 16 Mei 2015

<https://wiralabut.wordpress.com/2014/04/15/konstitusi/>, di akses pada tanggal 20 Mei 2015

<http://fsplem-bekasi.or.id/about/artikel/49/detail/Unsur-Unsur-yang-Terdapat-dalam-Konstitusi-Negara-Indonesia>, di akses pada tanggal 21 Mei 2015

<http://mediacenter.malangkota.go.id/2013/07/peran-Negara-dalam-sjsn-sangat-besar/>, di akses pada tanggal 15 Juni 2015

<http://library.fes.de/pdf-files/bueros/indonesien/11024.pdf>, di akses pada tanggal 7 Juni 2015

<http://sappk.itb.ac.id/wp-content/uploads/2014/01/Buku-Panduan-Layanan-bagi-Peserta-BPJS-Kesehatan.pdf>, diakses pada tanggal 4 Juni 2015

<http://www.sayangi.com/ekonomi/ekbis/read/14492/ini-alur-untuk-mendapatkan-layanan-bpjs-kesehatan> , di akses pada tanggal 4 Juni 2015

<http://sinarharapan.co/news/read/150130014/karut-marut-program-bpjs>, 1 Juni 2015

<http://jurnal123.com/2015/01/program-bpjs-kesehatan-semrawut/>, diakses pada tanggal 1 Juni 2015

<https://kunami.wordpress.com/2007/11/06/pelaksanaan-fungsi-hukum-administrasi-negara/> , di akses pada tanggal 18 Agustus 2015

Chandra Harimurti, “Berikut Ini Puluhan Permasalahan BPJS Kesehatan Versi Jamkes Watch”, 2014, (<http://jaringnews.com/hidup->

[sehat/umum/66017/berikut-ini-puluhan-permasalahan-bpjs-kesehatan-versi-jamkes-watch](#) ), 19 Agustus 2015.